

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK
BIDANG
PERADILAN AGAMA (KOMISI II)

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema **“Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”**, pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2012:

- Memperhatikan** :
1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.
 2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
 3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
 4. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan.
 5. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan.

Membaca : Paparan yang disajikan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Uldilag) MARI.
(Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.).
(Beberapa Permasalahan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama).
2. Hakim Agung Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.
(Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia).
3. Hakim Agung Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
(Ekonomi Syari'ah Peluang dan Tantangan Masa Kini dan Harapan Masa Depan).
4. Hakim Agung Dr. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum.
(Posisi Kedudukan Anak di Luar Nikah).
5. Hakim Agung Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
(Penalaran Hukum).
6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
(Upaya Peningkatan Kualitas SDM Peradilan Agama dan Pelayanan Prima Kepada Pencari Keadilan).

- Mendengar** : Tanggapan para peserta serta penjelasan dari:
a. Pemakalah.
b. Nara Sumber.
- Menimbang** : Perlu dirumuskannya diskusi dalam Komisi II atas topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas Peradilan baik di bidang Teknis maupun Non Teknis.

M E R U M U S K A N :

I. Teknis Yudisial.

A. Hukum Formil.

1. Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta kecuali yang diadakan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
2. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim harus bersikap responsive, progressive dan tidak terpaku pada sikap positivism.
3. Putusan hakim harus sistematis, rasional, responsive dan disusun dengan format yang baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mut'ah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas.
5. Faktor penentu kewenangan absolute dalam penyelesaian perkara perkawinan bukan didasarkan asas keislaman melainkan atas dasar perkawinan dicatat. Jika perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka penyelesaian perkara bidang perkawinan menjadi kewenangan pengadilan agama.
6. Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan

psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom.

7. Duplikat akta cerai dapat diterbitkan dengan syarat ada surat keterangan kehilangan akte cerai dari kepolisian, penerbitan duplikat dimaksud harus didasarkan atas data dalam register perkara dan register akta cerai yang berkaitan.
8. Biaya sita dan pemeriksaan setempat dalam gugatan reconvensi perkara bidang perkawinan dibebankan kepada pihak penggugat reconvensi, bukan kepada pihak penggugat konvensi.
9. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, demikian pula gugatan reconvensi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan dalam perkara cerai gugat/talak.
10. Dalam hal Hakim tingkat banding berpendapat perlu pemeriksaan ulang pokok perkara, maka tidak diputus dengan putusan akhir melainkan dengan putusan sela yang amarnya memerintahkan pengadilan agama memeriksa pokok perkara dan mengirimkan berita acara pemeriksaan tersebut kepada pengadilan tinggi agama bersangkutan.
11. Dalam hal Mahkamah Agung memutus membatalkan putusan Judex Facti yang amarnya memerintahkan pengadilan agama memutus pokok perkara, pengadilan agama harus memeriksa dan memutus ulang pokok perkara.
12. Adapun nomor perkara yang diperiksa ulang menggunakan nomor lama. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal seperti pemeriksaan verset.
13. Demi kepentingan hukum, ikrar talak yang sudah diucapkan didepan sidang pengadilan dapat dibatalkan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK).

14. Dalam kasus perceraian, sebelum memerintahkan para pihak untuk mediasi Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu.
15. Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraianya berlanjut, demikian juga mediasi dalam rekonsvensi.
16. Anggota keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan syiqaq.
17. Permohonan Wali adhal diajukan secara voluntair (Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
18. Jika terjadi gugatan waris antara orang yang beragama Islam kepada pengadilan negeri dan pengadilan agama maka pengadilan agama harus mengajukan perkara sengketa kewenangan kepada Mahkamah Agung dengan pemberitahuan kepada pengadilan negeri yang sama-sama memeriksa perkara tersebut.
19. Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan.
21. Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.
22. Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

B. Hukum Materiil.

1. Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya jika suami istri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut, akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.
2. Harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Istri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan istri kedua, ketiga, keempat.
3. Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.
5. Warga negara asing yang akan melakukan perkawinan di Indonesia dengan orang Indonesia maka ia harus memenuhi syarat perkawinan di negaranya dan tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Sehingga jika WNA tersebut akan melakukan poligami dan telah mendapat izin dari istrinya di luar negeri dengan tata cara hukum di negaranya pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang izin poligami lagi.
6. Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.

7. Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami.
8. Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.
9. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
10. Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

II. BIDANG ADMINISTRASI PERADILAN DAN ADMINISTRASI UMUM

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim, Panitera, Jurusita, Pejabat Struktural dan staf/operator melalui orientasi, bimbingan teknis maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), dan cara-cara lain sesuai ketentuan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Perma 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan mengupayakan pelatihan/sertifikasi mediasi bagi para hakim tingkat pertama oleh Ditjen Badilag,
3. Meningkatkan kualitas pemahaman Hakim di dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.
4. Meningkatkan implementasi KMA 1-144/SK/2010 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dengan melengkapi dan mengupdate content menu informasi peradilan pada website sebanyak 46 item untuk Pengadilan Tinggi Agama dan 47 item untuk Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatan

usul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periode April 2013.

6. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan meja informasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :
 - Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, dan instrumen permohonan informasi)
 - Melatih petugas meja informasi baik melalui program Ditjen Badilag atau melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di satuan kerja masing masing
7. Meningkatkan pelaksanaan implementasi SIADPA Plus dengan mengintegrasikan pada aplikasi laporan SMS Gateway.
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah sesuai Surat Dirjen Badilag No. 1207/DJA/AK.007/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi.
9. Untuk menjaga rasio kebutuhan dan kualitas hakim tinggi maka sistim rekrutmen dan promosinya harus melalui fit and proper test.
10. Untuk mengatasi kebutuhan Panitera Pengganti pada setiap PA maka ujian test untuk rekrutmennya didelegasikan kepada PTA masing masing.
11. Untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi 8 (delapan) area perubahan perlu diadakan pembimbingan/asistensi oleh Ditjen Badilag. Dan untuk mengetahui perkembangannya perlu monitoring dan evaluasi secara berkala.
12. Untuk meningkatkan kelancaran administrasi perkara, dalam hal pengadaan buku registrasi perkara dan akta cerai diserahkan kepada pengadilan tingkat banding.
13. Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkara ekonomi syariah perlu adanya pedoman administrasi perkara ekonomi syariah.
14. Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

15. Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangan dalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamah agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
16. Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukan pencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki bukti kepemilikan.
17. Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan pada website pengadilan dan upload Direktori Putusan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
18. Merintis kerjasama melalui MOU dengan Kementerian Hukum dan Ham dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum untuk tahun 2013.

III. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Justice for the poor, tentang sidang keliling dan perkara prodeo maka SEMA 10 TAHUN 2010 tentang Pedoman Pemberian bantuan Hukum, perlu direvisi khususnya ketentuan yang berkaitan dengan sistim pertanggung jawaban keuangannya agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan yaitu sistim adcost, dan perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus (SBK).
2. Wakil Sekretaris pengadilan tingkat banding yang mempunyai masa kerja jabatan lima tahun segera dilakukan mutasi secara nasional.
3. Untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis (Hakim, Panitera dan Juru Sita, pejabat kesekretariatan) perlu tersedianya anggaran yang seimbang untuk bimbingan teknis dan administrasi kesekretariatan.
4. Melanjutkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti dengan instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan negara-negara sahabat.
5. Memanfaatkan dan mengembangkan laboratorium-laboratorium dan galeri 130 tahun peradilan agama sebagai sarana pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pelayanan.
6. Melanjutkan pelaksanaan (rekomendasi) putusan-putusan rakernas yang lalu, seperti pelaksanaan program-program prioritas reformasi birokrasi dan perubahan peradilan secara umum, pemberian penghargaan-penghargaan, dan lain-lain.
7. Untuk kelancaran administrasi kepegawaian perlu adanya pendelegasian

wewenang pengangkatan pejabat eselon IV, V, pengangkatan panitera pengganti, PNS Gol II dan III dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat banding.

Manado, 31 Oktober 2012

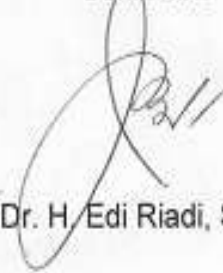
Tim Perumus :

Ketua



Drs. H. Zainudin Fajari, S.H., M.H.

Sekretaris




Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Anggota :

1. Drs. H. Rum Nessa, S.H., M.H.



2. Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.



3. Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H.



4. Drs. H. Djajusman M.S., S.H., M.H.



5. Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.



6. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



7. Drs. H. Abd. Ghani, S.H., M.H.



8. Tukiran, S.H.



9. Drs. Muhammad Yamin, S.H., M.H.



**DAFTAR PESERTA KOMISI II
PERADILAN AGAMA**

A. WAKIL KETUA, KETUA MUDA DAN HAKIM AGUNG

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Ahmad Kamil, S.H, M.Hum.	Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
2	Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H, M.H.	Ketua Muda MA Uldilag
3	Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.	Hakim Agung
4	Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum.	Hakim Agung
5	Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.	Hakim Agung
6	Dr. H. Hamdan, S.H, M.H.	Hakim Agung
7	Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H, M.H.	Hakim Agung

B. ESELON I DAN ESELON II

No	NAMA	JABATAN
1	Soeroso Ono, S.H, M.H.	Panitera Mahkamah Agung
2	Dr. H. Edi Riadi, S.H, M.H.	Panitera Muda Perdata Agama
3	Ali Murad Harahap, S.H, M.H.	Sekretaris Kepaniteraan
4	Drs. H. Farid Ismail, S.H.	Sekretaris Dirjen Badilag
5	Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Direktur Binganis . Badilag.
6	Drs. H. Sayed Usman, S.H, M.H.	Direktur Binadmin. Badilag.
7	Drs. H. Hidayatullah, S.H, M.H.	Direktur Pratalak. Badilag.

C. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Idris Mahmudy, S.H, M.H.	Ketua Mahkamah Syariaah NAD
2	Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H.	KPTA Medan
3	Drs. H. Moh. Thahir, S.H, M.H.	KPTA Padang
4	Drs. H. Mahyiddin Usman, S.H, M.H	KPTA Pekanbaru
5	Drs. H. Muzani Zahri, S.H, M.H	KPTA Jambi
6	Drs. H. Yasmidi, S.H, M.H	KPTA Palembang
7	Drs. H. Mudjtahidin, S.H, M.H	KPTA Bangka Belitung
8	Drs. H. Said Husin, S.H, M.H	KPTA Bengkulu
9	Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H, M.H.	KPTA Bandar Lampung
10	Drs. H. Sudirman Malaya, S.H, M.H	KPTA Banten
11	Drs. H. Khalilurrahman, S.H. MBA. M.H.	KPTA Jakarta
12	Dr. H. Chatib Rasyid, S.H, M.H	KPTA Bandung
13	Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H, M.H	KPTA Semarang
14	Drs. H. Ahmad Syarhuddin, S.H, M.H	KPTA Yogyakarta
15	Drs. H. M. Rum Nessa, S.H, M.H	KPTA Surabaya
16	Drs. H. Dja'far Abd. Muchith, S.H. M.HI.	KPTA Banjarmasin
17	Drs. H. Rodlin Afif, S.H.	KPTA Palangkaraya
18	Drs. H. Hefni H. S. Hasan , M.Hum.	KPTA Pontianak
19	Drs. H. Syamsul Falah, S.H, M.H.	KPTA Samarinda
20	Drs. H. Alimin Patawari, S.H, M.H.	KPTA Makassar
21	Drs. H. Muh. Djufri Palallo, S.H, M.H	KPTA Palu
22	Drs, H. Abdurrahman HAR, S.H.	KPTA Kendari
23	Ors. H. M. Sunusi Khalid, S.H, M.H	KPTA Gorontalo
24	Drs. H. M. Hasan H. Muhammad, S.H, M.H	KPTA Manado
25	Drs. H. A. Karim A. Razak, S.H, M.H	KPTA Mataram
26	Drs. H. Djajusman MS, S.H, M.H	KPTA Kupang
27	Drs. H. Jufri Ghalib, S.H, M.H	KPTA Ambon
28	Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H, M.H	KPTA Maluku Utara
29	Drs. H. Abu Amar, S.H, M.H	KPTA Jayapura

D. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H.	WK. Mahkamah Syar'iyah Prov. Aceh
2	Drs. H. M. Syahron Nasution, S.H, M.H	WK. PTA. Medan
3	Dra. Hj. Husnaini A, S.H. M.Ag.	WK. PTA. Padang
4	Drs. H. Armia Ibrahim, S.H.	WK. PTA. Pekanbaru
5	Drs. H. Yamin Awie, S.H, M.H	WK. PTA. Jambi
6	Drs. H. A. Dahlan, S.H, M.H	WK. PTA. Palembang
7	Drs. H. Ajis Jaman Gani, M. HI.	WK. PTA. Bangka Belitung
8	Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H, M.H.	WK. PTA. Bengkulu
9	Drs. H. Rahmat Satya Wibawa, M.Hum.	WK. PTA. Bandar Lampung
10	Drs. H. Muwahiddin, S.H, M.H	WK. PTA. Banten
11	Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PTA. Jakarta
12	Drs. Hasan Bisri, S.H. M.Hum.	WK. PTA. Bandung
13	Drs. H. Said Munji, S.H, M.H.	WK. PTA. Semarang
14	Drs. H. Mansur Nasir, S.H.	WK. PTA. Yogyakarta
15	Drs. H. Amran Suadi, S.H. M.H, M.M.	WK. PTA. Surabaya
16	Dr. H. Nurdin Juddah, S.H, M.H	WK. PTA. Banjarmasin
17	Drs. H. Ahmad S.H, M.H.	WK. PTA. Palangkaraya
18	Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H, M.H	WK. PTA. Pontianak
19	H. Helmy Bakri, S.H, M.H	WK. PTA. Samarinda
20	Drs. Bahrussam Yunus, S.H, M.H	WK. PTA. Makassar
21	Drs. H. M. Thahir R, S.H, M.H	WK. PTA. Kendari
22	Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H, M.H.	WK. PTA. Palu
23	Drs. H. Muslimin Simar, S.H, M.H	WK. PTA. Gorontalo
24	Drs. H. Abuhuraerah, S.H, M.H	WK. PTA. Manado
25	Drs. H. Marsaid, S.H. M.M.	WK. PTA. Mataram
26	Drs. H. Bambang Ali Muhadjir	WK. PTA. Kupang
27	Dr. H. A. Mukti Arto, S.H, M.Hum.	WK. PTA. Ambon
28	Drs. Hasan Basri Harahap, S.H.	WK. PTA. Maluku Utara
29	Drs. Masykur Latuconsina	WK. PTA. Jayapura

E. ASISTEN KOORDIONATOR

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Abdul Ghani, S.H, M.H.	Askor Tim E
2	Suhartanto, S.H, M.H	Askor Tim B.2

F. PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Syamsikar	Pan / Sek MSy Prov. Aceh
2	Tukiran, S.H.	Pan / Sek PTA. Medan
3	Drs. Yustan Azidin, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Padang
4	Drs. Syafruddin	Pan / Sek PTA. Pekanbaru
5	Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.	Pan / Sek PTA. Jambi
6	Ahmad Zaini, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Palembang
7	Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.	Pan / Sek PTA. Bangka Belitung
8	H. A. Jakin Karim, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Bengkulu
9	Drs. Muhammad Yamin, M.H.	Pan / Sek PTA. Bandar Lampung
10	Dra. Hj. Siti Maryam	Pan / Sek PTA. Banten
11	Ach. Jufri, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Jakarta
12	H. Tri Haryono, S.H.	Pan / Sek PTA. Bandung
13	Drs. Djuhrianto Arifin, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Semarang
14	Supardjiyanto, S.H.	Pan / Sek PTA. Yogyakarta
15	Rahmadi Suhamka, S.H.	Pan / Sek PTA. Surabaya
16	Muchammad Yusuf, S.H.	Pan / Sek PTA. Pontianak
17	Drs. Darmadi	Pan / Sek PTA. Palangkaraya
18	Baserani, S.H.	Pan / Sek PTA. Banjarmasin
19	Drs. M. Darman Rasyid, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Samarinda
20	Drs. H. Nurdin D.	Wapan PTA. Makassar
21	Khaeril Anwar, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Palu
22	Drs. Arisno Mertosono, S.H.	Pan / Sek PTA. Kendari
23	Ekram Payapo, S.Ag.	Pan / Sek PTA. Gorontalo
24	Ma'sum Umar, S.H, M.H.	Pan / Sek PTA. Manado
25	H. Muh. Ibrahim, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Mataram

26	Drs. Misbahul Munir, S.H.	Pan / Sek PTA. Kupang
27	Basri, S.H, M.H	Pan / Sek PTA. Ambon
28	Drs. H. M. Nawawi	Pan / Sek PTA. Maluku Utara
29	Herlinawaty, S.H, M.H.	Pan / Sek PTA. Jayapura

P A S G M